

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. *Stewardship Theory*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Stewardship. Teori yang menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Pendapat ini juga dikatakan oleh Davis, Schoorman dan Donaldson (1997) Teori ini merupakan suatu pandangan baru tentang pengelolaan organisasi. Yaitu dengan bagaimana cara membentuk suatu perilaku dimana orang bekerja tidak hanya menghasilkan utilitas pribadinya saja tetapi mereka juga dapat lebih bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang berlaku sekarang yaitu dari konsep mengendalikan dan mengarahkan ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan bersama oleh anggota/tim organisasi. Dalam prespektif teori stewardship yang mengarah pada informasi, transparansi, akuntabilitas, dan aspek-aspek yang bersifat kolektivitas/kebersamaan, dan pemberdayaan, bersifat jangka panjang, peningkatan kinerja, kepercayaan, rentang kekuasaan rendah.

Teori ini dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan (Thorton 2009) dan nonprofit lainnya (WILSON, 2010). Sejak awal tahun perkembangan teori ini, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara steward dengan principals karena Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengolahan (penata layanan) dengan beberapa asumsi dasar (*Fundamental assumptions of Stewardship Theory*). Jika *Stewardship Theory* memandang bahwa pemerintah sebagai “steward/penata layanan” maka akan bertindak dengan penuh kesadaran, arif, dan bijaksana bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah bertindak sebagai stewards, penerima amanah yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

*Stewardship Theory* lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa berusaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan organisasi/publik. Disini principle sebagai pemberi tanggung jawab juga memiliki peran memonitori *steward* dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima wewenang. *Steward* atau pihak pemerintah (penata layanan) juga harus memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan masyarakat agar kinerja dan penerapannya dapat berjalan dengan baik dan optimal demi terciptanya tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang lebih transparan dan akuntabel. Pada *Stewardship Theory*, model of man ini didasarkan pada

pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro organisasional*, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan *principle* dimana para *steward* berada. *Steward* akan menggantikan atau mengalihkan *self serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara *steward* dan *principle* tidak sama, *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan (Anton, 2010).

Implikasi *stewardship theory* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi seta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

## 2. Contingency Theory

Teori *contingency* menjelaskan tentang kepemimpinan dengan berdasarkan pada situasi organisasi dan kepemimpinan. Tidak semua organisasi dapat bertahan dengan gaya kepemimpinan dengan kondisi atau situasi tertentu. Teori *contingency* lebih menekankan pada kepribadian seorang pemimpin dan situasi

yang dihadapi. Menurut Stoner et al (1996) pendekatan kontigensi atau pendekatan situasional merupakan suatu “pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Pendekatan ini lebih mengartikan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan entah dari sifat dan perilaku apapun yang akan cocok dengan semua situasi. Masing-masing situasi membutuhkan pemimpin dengan gaya kepemimpinan dengan sifat tertentu. *Contingency teory* menjelaskan tentang dasar-dasar perusahaan atau manajemen suatu perusahaan dengan bersifat umum karena setiap organisasi atau perusahaan memiliki karakteristik dan berada dalam kondisi ataupun situasi yang berbeda-beda. Teori ini membantu para pemimpin dengan potensial tertentu dalam menilai sebuah situasi yang cocok dengan gaya kepemimpinan dan perilaku mereka (Raybun, 2009). Pendekatan kontijensi pada akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor- faktor situasional yang ada dalam organisasi (Mulyani & Wibowo, 2017).

Menurut pendapat Comunale et al (2021) munculnya teori kontijensi dalam akuntansi pemerintahan berawal dari adanya keinginan untuk melakukan suatu reformasi terhadap sistem akuntansi pemerintahan dari sistem akuntansi tradisional menjadi sistem akuntansi yang lebih informatif. Sistem yang lebih

informatif akan tertuju pada pasokan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan serta menyediakan dasar untuk kontrol keuangan pada kegiatan pemerintah. Implikasi *Contingency Theory* pada penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan faktor kontijensi untuk mengevaluasi keefektifan partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

### 3. Akuntabilitas Keuangan Publik

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban kepada otoritas tertentu. Dengan demikian dalam akuntabilitas terdapat dua pihak yaitu pemberi tanggung jawab dan pihak lain yang menerima tanggung jawab (Khan 2006). Akuntabilitas adalah kewajiban pada suatu organisasi untuk menghitung dan mencatatnya dengan cermat menggunakan deskripsi yang akurat tentang transaksi keuangan dan ekuitas organisasi dan kemudian menyerahkan laporan tersebut ke laporan tahunan. Seperti dapat dilihat akuntabilitas publik menuntut aparatur publik untuk dapat menjelaskan secara transparan (transparan) dan terbuka kepada publik tentang tindakan yang dilakukan.

### 4. *E-Payment*

Sistem pembayaran dan model transaksi ekonomi terus berubah. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah mengubah peran uang tunai sebagai alat pembayaran nontunai yang lebih efisien dan ekonomis (Pramono 2006). *Good Governance* dapat dikatakan baik dan berkualitas merupakan suatu keberhasilan bagi setiap negara. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki

program gerakan pembayaran menggunakan transaksi non tunai (Non Cash) dengan tujuan mewujudkan *good governance* yang efektif dan efisien, akuntabilitas dan transparans. Program pelaksanaan pembayaran non tunai ini diharapkan dapat membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan tentunya bebas korupsi sesuai dengan peraturan presiden No. 10 Tahun 2016.

#### 5. *E-Service*

Menurut Hasan, dkk (2011) *E-Service* merupakan penyediaan layanan melalui jaringan elektronik seperti internet. Di lembaga pemerintah, *E-Service* mengacu pada pengiriman informasi dan peningkatan layanan online melalui internet atau alat digital lainnya untuk semua pemangku kepentingan (masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya). Aplikasi tersebut nantinya dapat diakses melalui smartphone berbasis android (Nazruddin Safaat 2011). Secara keseluruhan, proses pengembangan *E-Service* sangatlah tergantung kepada keadaan sektor industri TIK itu sendiri, hal tersebut juga sangat tergantung kepada kesiapan penggunaan TIK baik di dunia pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Dengan kata lain, kesenjangan akan akses dan literacy akan dunia digital dapat dikatakan sebagai sebuah hambatan untuk mewujudkan system *E-Government*. Beberapa penyebab munculnya kesenjangan ini seperti faktor kurangnya infrastruktur jaringan telekomunikasi kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK, selain itu nilai-nilai konservatisme di masyarakat masih kuat, sehingga akan menghambat

pemasyarakatan TIK serta terbatasnya akses internet dan jaringan (Rahmawati 2011). Dalam penelitian *E-Government*, dimensi layanan dari layanan elektronik sering dibahas (misalnya Goldkuhl, 2007, Persson, 2009) dalam konteks *E-Government*, *E-Services* biasanya berhubungan dengan barang-barang tidak berwujud seperti pertukaran informasi untuk menerima izin, pengeluaran, pendaftaran pajak atau sejenisnya. Bahkan, seperti yang digaris bawahi beberapa pengamat, *E-Government* merupakan perwujudan dari pemerintahan yang intens informasi. Akibatnya, layanan elektronik menjadi masalah pengelolaan informasi dan hubungan antara pemerintah dan warga negara menjadi hubungan berbasis informasi (Bekkers & Homburg, 2005; Taylor & Lips, 2008). Maka dari itu pemerintah (agent) harus dapat memastikan layanan yang diberikan berkualitas dan menghindari perbedaan antara apa yang diharapkan pelanggan atau masyarakat dengan layanan yang diberikan, Zeithaml et al. (1990) menyatakan bahwa pemasok layanan atau pemerintah harus meneliti harapan pelanggan, menentukan jenis layanan yang sesuai dengan harapan ini, memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintah mengikuti spesifikasi layanan ini, dan mengomunikasikan informasi tentang layanan kepada masyarakat yang menetapkan harapan yang realistis. Berdasarkan karakteristik layanan yang disebutkan maka terjadi hubungan asimetris antara penyedia layanan dan pengguna/pelanggan layanan tersebut, di mana pelanggan pada akhirnya menentukan kualitas layanan.

## 6. *E-Budgeting*

*E-Budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk program aplikasi komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dalam sistem ini terdapat beberapa item untuk mendukung keberhasilan dari *E-Budgeting* diantaranya yaitu *E-project*, *E-Delivery*, dan *E-Controlling*. Sistem ini dibuat secara online agar dapat diakses oleh dinas dimanapun lokasinya, dapat diakses pada saat pembahasan dengan dewan dan dapat diakses oleh masyarakat jika ingin mengetahui kinerja pemerintah dan juga sirkulasi keuangan daerah. (Khoirunnisak, Arishanti, and Vebrianti 2017). Menurut Penelitian Latif, dkk (2019) Transparansi dalam *E-Budgeting* yaitu meliputi adanya informasi mengenai usulan anggaran, anggaran yang disetujui, implementasi anggaran dan pengawasan anggaran. Akuntabilitas dalam *E-Budgeting* meliputi adanya peluang bagi warga untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Dengan implementasi e-government transaksi anggaran juga ditampilkan secara elektronik atau disebut *E-Budgeting*. Pada abad ke-21 warga menuntut transparansi dan akuntabilitas anggaran dimana masyarakat ingin tahu bagaimana pajak yang dikumpulkan dari mereka digunakan. Jika pemerintah tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut maka pemerintah tidak dapat mempertahankan kredibilitasnya atau memenuhi kewajiban perpajakan warganya (Krafchik 2018).

Tabel 2. 1

## Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti   | Judul Penelitian   | Variabel Penelitian   | Hasil   |
|----|---|--|---|---|
| 1  | Agbata, et al (2020)<br><br>African Journal of Accounting Economic, Finance and Banking Reaserch Vol 13 No. 13 2020 | Impact Of Electronic Payment System On Public Sector<br><br>Organisation: Study Of Selected Ministries, Departements and Agencies in Nigeria | Variabel X :<br>E-Payment<br><br>Variabel Y :<br>Transparansi dan Akuntabilitas | E-Payment berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas |
| 2  | Kurnia, L. D. (2020)<br><br>Jurnal Manajemen Vol. 14 No. 1 April 2020 ISSN 1978-6573                                | Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung       | Variabel X :<br>E-Payment<br><br>Variabel Y :<br>Transparansi dan Akuntabilitas | E-Payment berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas |
| 3  | R Ahmad Buchari (2016)<br><br>Sosiohumaniora, Vol 18 No. 3 Nopember 2016 : 235 - 239                                | Implementasi E-Service Pada Organisasi Publik di Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung          | Variabel X :<br>E-Service<br><br>Variabel Y :<br>Transparansi dan Akuntabilitas | E-Service tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas   |

- |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| 4 | Siregar, R. S. N.,<br>Marzuki, M., &<br>Affan, I. (2021)                                      | Sistem Pelayanan<br>Elektronik Melalui<br>Aplikasi E-<br>SAMSAT Dalam<br>Rangka Upaya<br>Mewujudkan Azas-<br>azas Umum<br>Pemerintahan Yang<br>Baik (Studi Pada<br>UPT Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah<br>Medan Utara) | Variabel X :<br><br>E-Service<br><br>Variabel Y :<br><br>Kualitas E-<br>Service                 | E-Service tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>transparansi dan<br>akuntabilitas        |
|   | Jurnal Ilmiah<br>METADATA<br>Vol 3 No.1<br>Januari 2021<br>ISSN 2723-7737                     |   |   |  |
| 5 | Dito A & Puja R<br>(2018)   | Pengaruh<br>Implementasi E-<br>Budgeting terhadap<br>Transparansi<br>Keuangan Daerah<br>di Indonesia  | Variabel X :<br><br>E-Budgeting<br><br>Variabel Y :<br><br>Kinerja<br>Keuangan                  | E-Budgeting<br>berpengaruh<br>positif terhadap<br>Transparansi<br>Kinerja<br>Keuangan  |
|   | Jurnal Studi<br>Akuntansi &<br>Keuangan Vol. 2<br>No. 3 2018 ISSN<br>2597-7601                |   |   |  |
| 6 | Anggi P & Atika<br>(2019)   | Implementasi E-<br>Budgeting sebagai<br>Upaya Peningkatan<br>Trasparansi dan<br>Akuntabilitas<br>Pemerintah Daerah<br>Kota Binjai   | Variabel X :<br><br>E-Budgeting<br><br>Variabel Y :<br><br>Transparansi<br>dan<br>Akuntabilitas | E-Budgeting<br>berpengaruh<br>positif terhadap<br>Transparansi<br>dan<br>Akuntabilitas |
|   | Jurnal Akuntansi<br>Bisnis dan Publik<br>Vol. 9 No. 2<br>Februari 2019<br>ISSN 2087 -<br>4669 |   |   |  |
| 7 | G. Das Prena &<br>Putu D (2020)   | Implementation Of<br>E-Budgeting To<br>Government<br>Performance With<br>Internal Control As  | Variabel X :<br><br>E-Budgeting<br><br>Variabel Y :   | E-Budgeting<br>berpengaruh<br>positif terhadap<br>Transparansi<br>dan<br>Akuntabilitas |
|   | E-Jurnal<br>Akuntansi Vol.<br>30 No.5   |   |   |  |

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    | Denpasar, Mei<br>2020 ISSN 2302-<br>8556  | A Moderation<br>Variable  | Transparansi<br>dan<br>Akuntabilitas  |   |
| 8  | P. Mulyono<br>(2020)<br><br>Airlangga<br>Development<br>Journal Vol.1 No.<br>1 2020 ISSN<br>2528-3642 | Analisis<br>Pelaksanaan<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa Secara<br>Elektronik pada<br>Pemerintah<br>Kabupaten Gresik | Variabel X :<br>E-Service<br><br>Variabel Y :<br>Transparansi<br>dan<br>Akuntabilitas | E-Service<br>berpengaruh<br>positif terhadap<br>transparansi dan<br>akuntabilitas |
| 9  | Rismayadi<br>(2019)<br><br>Journal of<br>Chemical<br>Information and<br>Modeling Vol. 53<br>No.9 2019 | Akuntabilitas dan<br>Transparansi dalam<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan Parigi<br>Kabupaten<br>Pangandaran     | Variabel X :<br>E-Service<br><br>Variabel Y :<br>Transparansi<br>dan<br>Akuntabilitas | E-Service tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>transparansi dan<br>akuntabilitas   |
| 10 | Tribudhi &<br>Soeharjoto<br>(2019)<br><br>Kinerja Journal<br>Vol.16 No.1<br>2019 ISSN 1907-<br>3011   | Determinasi<br>transaksi dengan<br>menggunakan uang<br>elektronik di<br>Indonesia                               | Variabel X :<br>E-Payment<br><br>Variabel Y :<br>Transparansi<br>dan<br>Akuntabilitas | E-Payment<br>berpengaruh<br>positif terhadap<br>transparansi dan<br>akuntabilitas |
| 11 | F.Permaqi (2015)<br><br>Jurnal Legilasi<br>Indonesia Vol. 53<br>No.9 2015                             | E-Budgeting dalam<br>Keuangan Negara<br>dan Keuangan<br>Daerah (E-<br>Budgeting On State                        | Variabel X :<br>E-Budgeting<br><br>Variabel Y :                                       | E-Budgeting<br>tidak<br>berpengaruh<br>terhadap<br>Transparansi                   |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  | Budget and Regional Budget)   | Transparansi dan Akuntabilitas  | dan Akuntabilitas   |
| 12 | Zahri & Kusumastuti (2020)   | Determinan Persepsi Pengguna, Kepuasan Pengguna dan Kesuksesan Implementasi E-Budgeting di Pemerintah Kota Surakarta:(Studi Kasus Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Surakarta) | Variabel X : E-Budgeting<br>Variabel Y : Transparansi dan Akuntabilitas | E-Budgeting berpengaruh positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas |
|    | RISSET & JURNAL AKUNTANSI Vol 4 No. 1 Februari 2020 ISSN : 2548-7507                 |   |   |   |
| 13 | Wahyu Setyawan dan Rindu Rika Gamayuni (2020)  | The Quality of Financial Reporting and Internal Control System before and after the Implementation of E-budgeting in Indonesia Local Government                                     | Variabel X : E-Budgeting<br>Variabel Y : Transparansi dan Akuntabilitas | E-Budgeting berpengaruh positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas |
|    | Asian Journal of Economics, Business and Accounting Vol.14 No.3 2020 ISSN: 2456-639X |   |   |   |

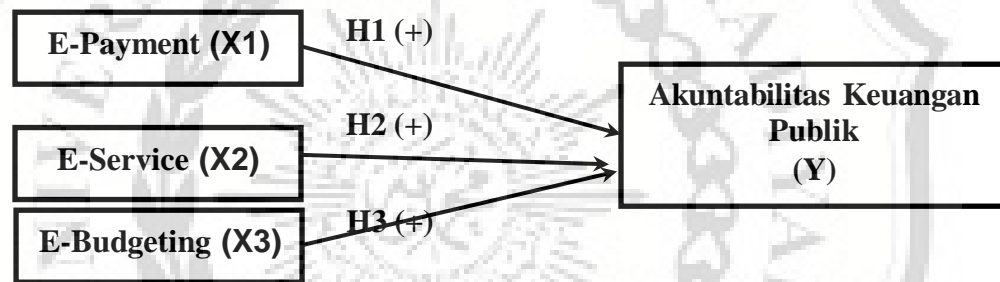
## B. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

### 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, kerangka pemikiran yang mendasari penulisan ini menggunakan beberapa landasan teori. Landasan Teori

yang digunakan adalah didasarkan pada *Stewardship Theory* dan *Contingency Theory*. Dari perspektif teori tersebut menjelaskan bahwa akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik dan kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggungjawab kepada pemilik (Aleksashin 1965).

Gambar 2. 1  
Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 2.1 menyajikan sebuah kerangka pemikiran penelitian ini berdasarkan kerangka tersebut maka dapat dirumuskan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan publik sebagai variabel dependen.

## 2. Pengembangan Hipotesis

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara

berimbang. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Bayinah & Bahri, 2018). Transparansi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah memberikan informasi transaksi yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat/konsumen berdasarkan pertimbangan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban perusahaan dalam proses transaksi keuangan yang dipercayakan kepadanya. Transparansi dibutuhkan dalam pencatatan transaksi *E-Payment* untuk mencegah kesalahan transaksi. Pengguna teknologi mempercayai bahwa sistem layanan *E-Payment* mudah dipahami dan mudah dioperasikan, kemudahan sistem dalam bertransaksi menggunakan layanan uang elektronik yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah. Hasil penelitian Syahputra and Khairina (2021) menyimpulkan bahwa *E-Payment* terbukti dapat membantu optimalisasi penghimpunan dana melalui program wakaf yang dikelola oleh LKS-PWU maupun lembaga filantropi Islam mampu memudahkan calon wāqif untuk berwakaf tanpa harus datang ke kantor, transaksi menjadi lebih aman, nyaman, kapanpun dan dimanapun serta kapanpun. Hasil penelitian Kasmadi (2020) membuktikan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai Pemerintah Kabupaten Kampar dimulai secara penuh pada bulan Januari 2018 sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah

daerah kabupaten/kota, Tingkat penerapan transaksi non tunai yang telah dilakukan sudah menunjukkan persentase 75 % pada tingkat penerapan “Baik” hal ini tentunya mendukung bahwa penerapan Sistem Pembayaran Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *E-Payment* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan publik yang didukung dengan hasil penelitian menunjukkan penerapan Transaksi Non Tunai ini dirasakan dapat meningkatkan perwujudan prinsip *Good governance* terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya penerapan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi (Kurnia, 2020).

### **H1: E-Payment berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik**

Pengaruh lingkungan dan globalisasi yang membawa dampak pada ciri masyarakat yang berbasis informasi ini, membuat organisasi publik dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas yang tercermin dari adanya prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu transparan, akuntabilitas, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, responsive, efektif dan efisien (Sinambela, 2006). Keterbukaan mengacu pada transparansi pelayanan publik (Jorgensen dan Bozeman 2007). Hal ini menunjukkan sejauh mana

sebuah organisasi mengungkapkan proses pengambilan keputusan dan prosedur serta informasi kinerja secara tepat waktu (Wong dan Welch 2004). Sebuah organisasi publik dapat terbuka dengan mengungkapkan apa yang diperlukan, misalnya, kebijakan publik dan informasi anggaran (Jorgensen dan Bozeman 2007). Dalam hal ini, proses dapat dilacak secara online, seperti publikasi rencana tahunan, kemajuan serta laporan anggaran dan biaya adalah indikator kunci. Oleh karena itu *E-Service* adalah suatu keharusan bagi pemerintah dalam menciptakan unsur-unsur dari good governance, dikarenakan dengan adanya *E-Service* akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien dari pelayan publik. Hasil penelitian (Siregar et al., 2021) E-SAMSAT belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui program E-SAMSAT masih belum memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria kualitas pelayanan publik. Karena belum terpenuhinya kualitas pelayanan publik, maka E-SAMSAT juga belum mampu untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berbanding dengan hasil penelitian tersebut, pelaksanaan pelayanan elektronik melalui program E-Kelurahan memberikan manfaat bagi kemudahan warga masyarakat dalam pencatatan data kependudukannya. Data tersebut dapat menjadi data utama dalam program-program selanjutnya yang berkaitan dengan bidang administratif sebuah kantor kewilayahan sebagai dasar data yang digunakan untuk program-program pemerintah yang akan dilakukan

(Buchari, 2016). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian penerapan *E-Service* melalui program *E-Service Corner* yang dilaksanakan di Kecamatan Tamalanrea *E-Service corner* ini dianggap sangat mapan dalam pelayanan publik terutama di tingkat kabupaten karena tingkat kabupaten juga merupakan pusat layanan masyarakat. *E-Service Corner* merupakan inovasi layanan yang sangat memantu masyarakat dalam melayani karena selain manfaat yang diterima masyarakat juga dianggap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan mengajarkan masyarakat untuk mandiri dan dapat dengan mudah melakukan kegiatan terkait pelayanan di kecamatan Tamalanrea (Hakim and Mustari 2019).

## **H2: E-Service berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik**

*E-Budgeting* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Anggaran memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintah. Anggaran dijadikan sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya pemerintah mewujudkan kemakmuran masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa penganggaran kinerja memiliki tolok ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Nordriawan, 2007). *E-Budgeting* pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi pengelolaan

keuangan daerah sangat penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pejabat pemerintahan (eksekutif dan legislatif) yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Dalam hal pengambilan keputusan yang efektif terkait dengan upaya-upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. Di samping transparansi, akuntabilitas juga merupakan standar profesional yang harus dicapai/ dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat/sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kelemahannya (Dt, 2009). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Jabbra Dwivedi (1989) akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada organisasi tempat kerjanya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan (Das Prena & Deviyanti Putri, 2020) menemukan bahwa penerapan *E-budgeting* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, didasarkan pada memahami bahwa penerapan *E-budgeting* mendorong efisiensi dan membantu penyusunan APBD sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kinerja

instansi pemerintah. Hal tersebut juga memberikan hasil yang sama pada implementasi *E-Budgeting* di kota Bandung yang telah memberikan informasi yang transparan mengenai informasi usulan anggaran, anggaran, dan implementasi anggaran. *E-Budgeting* kota Bandung juga telah bersifat akuntabel. Syarat akuntabilitas yaitu harus dipenuhinya peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran (Latif, Saadahd, and Arsalan 2019).

**H3: E-Budgeting berpengaruh Positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik**

